PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Soa Siu- Dok II Bawah, Jayapura
Website : http://www.papua.go.id Email : diskominfo@papua.go.id

Jayapura, 23 Oktober 2026

Nomor : 500.12.10.3/832/Diskominfo
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Klarifikasi Hasil Monev
Keterbukaan Informasi Publik tahun 2026

Yth. Ketua Komisi Informasi Pusat RI
Cq Ketua Panitia Monev Komisi Informasi Pusat Tahun 2026
di Jakarta

Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi (E-Monev) Komisi Informasi Pusat Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Papua telah menerima, melihat dan mempelajari hasil verifikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Monev Pemerintah Provinsi Papua perlu melakukan klarifikasi dan/atau perbaikan atas hasil verifikasi dimaksud. Bersama surat ini kami lampirkan hasil klarifikasi sebagai bahan tindak lanjut dan peninjauan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua

JERI AGUS YUDIANTO, S.Kom., M.Si
NIP. 19730723 200112 1 004

Tembusan :
1. Gubernur Papua di Jayapura.
2. Wakil Gubernur Papua

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Soa-Siu Dok II Bawah – Jayapura,
Website : https://www.papua.go.id **e-mail : diskominfo@papua.go.id**

NO.	INDIKATOR	PERTANYAAN		KLARIFIKASI	EVIDENCE
1	MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK	**I. MENGUMUMKAN INFORMASI TENTANG PROFIL PEMERINTAH PROVINSI**			
		2.a	Pimpinan tertinggi Pemerintah Provinsi;	LHKPN Gubernur berupa link yang apabila diklik akan langsung mendownload file LHKPN tersebut.	https://ppid.papua.go.id/download/pusat-download/download/ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2.htm

		II. Mengumumkan Informasi Tentang Program dan/atau Kegiatan			
		II.4	Informasi khusus lainnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat	Berikut kami sampaikan link yang baru	https://beasiswa.patriotmuda.id/papua
2	**MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK**	**I. Daftar Informasi Publik**			
		3.ii	Dokumen Rencana Umum Pengadaan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021	Domain Pemerintah Provinsi Papua (papua.go.id) mengalami gangguan pada kemudian dilakukan recovery Linknya sudah bisa dibuka	
		3.iii	Dokumen-dokumen Tahap Pemilihan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021	Domain Pemerintah Provinsi Papua (papua.go.id) mengalami gangguan pada kemudian dilakukan recovery Linknya sudah bisa dibuka	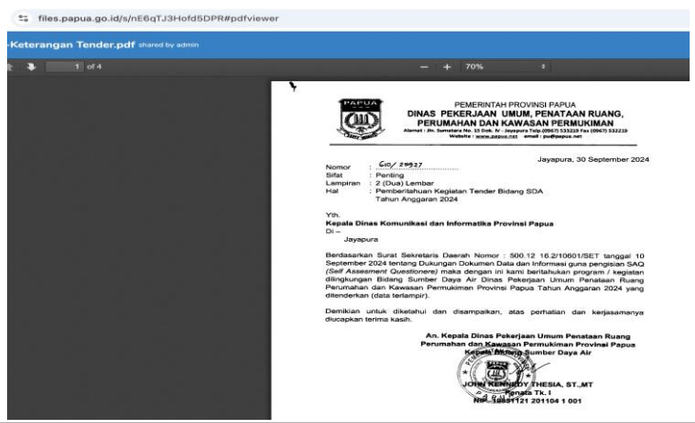

		3.iv	Dokumen-dokumen Tahap Pelaksanaan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021	Domain Pemerintah Provinsi Papua (papua.go.id) mengalami gangguan pada kemudian dilakukan recovery Linknya sudah bisa dibuka	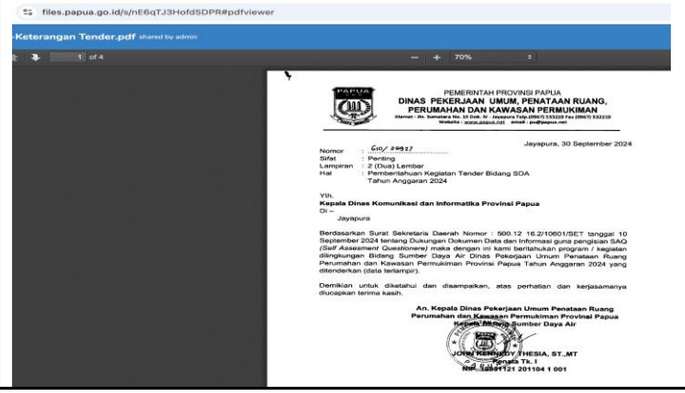
3	**PENGEMBANGAN WEBSITE**	**I. PROFIL PPID PADA LAMAN WEBSITE**			
		I. 3	Profil dan Struktur PPID	Bagan Struktur PPID ada pada gambar yang ke-2, Serta kami sampaikan link bagan Struktur PPID	https://ppid.papua.go.id/detail/pages/15/struktur-organisasi.htm
4	**PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**I. MENGUMUMKAN INFORMASI TAHAP PERENCANAAN**			

		2.b	Sebutkan 2 (dua) pengadaan strategis Tahun 2026 yang TELAH SELESAI LELANG	Berikut kami sampaikan Paket Pengadaan yang baru	**Nama Paket : Belanja Modal Bangunan Gedung Bandara - Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara Botawa Di Kabupaten Waropen (DTI)** **Nilai Paket : Rp. 1.000.000.000,00** 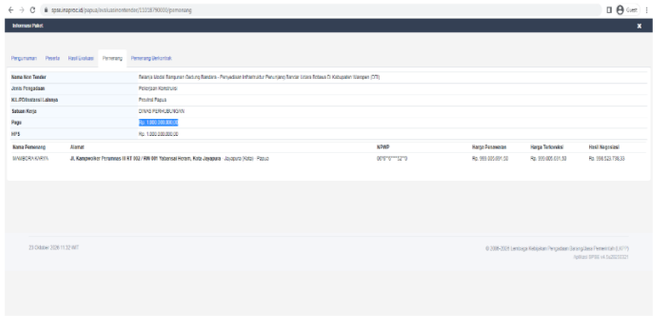
		II. MENGUMUMKAN INFORMASI TAHAP PEMILIHAN…			
		b.	Paket 2 (sebutkan nama paket)	Berikut kami sampaikan Paket Pengadaan yang baru	**Nama Paket : Belanja Modal Bangunan Gedung Bandara - Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara Botawa Di Kabupaten Waropen (DTI)** **Nilai Paket : Rp. 1.000.000.000,00** 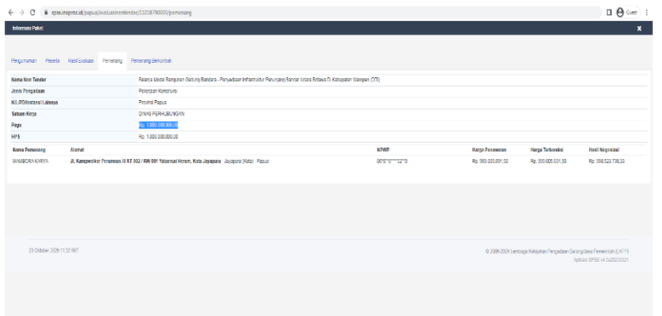
		III. **MENGUMUMKAN TAHAP PELAKSANAAN. . .**			

		b.	Paket 2 (sebutkan nama paket)	Berikut kami sampaikan Paket Pengadaan yang baru	**Nama Paket : Belanja Modal Bangunan Gedung Bandara - Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara Botawa Di Kabupaten Waropen (DTI)** **Nilai Paket : Rp. 1.000.000.000,00** 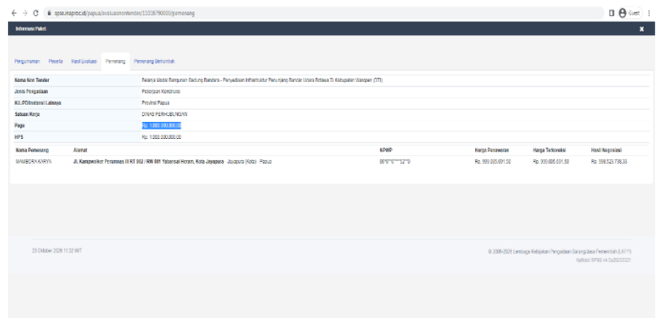
5	**KELEMBAGAAN**	**IV Fasilitasi Keterbukaan Informasi Publik**			

		IV. 1a	Penyelesaian sengketa informasi	Berdasarkan Surat Sekda Papua No: 100.3.2/10345/SET Tanggal 12 September 2025 Tentang Pemberitahuan kepada Komisi Informasi Pusat Dengan Dinamika pemerintahan dan minimnya fiscal yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua maka Anggaran Untuk Komisi Informasi Papua tidak dianggarkan. Untuk anggaran PPID Utama masuk pada DPA Perubahan Dinas Kominfo Provinsi Papua Bukti pelaksanaan kami lampirkan link	 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SEKRETARIAT DAERAH Jayapura, 12 September 2025 Nomor : 100.3.2/10345/SET Sifat : Penting Lampiran : - Hal : Pemberitahuan Yth. Komisi Informasi Pusat di - Jakarta Sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua No. 188./189/Tahun 2024 Tentang Penetapan Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Papua Periode Tahun 2019 – 2023, Tanggal 29 Mei 2024 pada tanggal 31 Desember 2024 dan SK tersebut belum dapat diperpanjang lagi karena dinamika pemerintahan dan minimnya fiscal yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Komisi Informasi Pusat untuk mencari solusi yang terbaik bagi Komisi Informasi Provinsi Papua. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Pj. SEKRETARIS DAERAH SUZANA D. WANGGAI, S.Pd, MSocSc PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19680821 199610 2 001 Tembusan : Pj. Gubernur Papua di Jayapura. https://papua.go.id/view-detail-berita-9853/pemprov-papua-perkuat-keterbukaan-informasi-publik-melalui-sosialisasi-ppid-di-keerom.html https://diskominfo.papua.go.id/berita/373/diskominfo-papua-perkuat-keterbukaan-informasi-publik-melalui-sosialisasi-ppid-di-kabupaten-supiori.html https://diskominfo.papua.go.id/berita/369/diskominfo-papua-perkuat-keterbukaan-informasi-publik-melalui-sosialisasi-ppid-di-kabupaten-jayapura.html
		IV. 1b	Monitoring kepatuhan pelaksanaan UU KIP		
		IV. 1c	Sosialisasi		
		IV.1d	Layanan administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi		
		IV. 2	Fasilitasi Sarana dan Prasarana bagi Komisi Informasi berupa perkantoran/gedung, alat mobilitas, alat kerja		
		IV. 3	Menyediakan anggaran pengelolaan keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh PPID dan PPID Pelaksana		
		VII	Pemerintah Provinsi menyediakan Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian		

			sengketa		

Jayapura, 23 Oktober 2026

Selaku Ketua PPID Utama Provinsi Papua

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Papua

JERI AGUS YUDIANTO, S.Kom., M.Si

NIP. 19730723 200112 1 004